



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2020-2024

NO	Rancangan Undang-Undang	Pengusul/Usulan
1.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR
2.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
3.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
4.	RUU tentang Keamanan Laut	DPR
5.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/Pemerintah
6.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/Pemerintah/DPD
7.	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR/Pemerintah/DPD
8.	RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional (RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos)	DPR/Pemerintah
9.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/Pemerintah
10.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	DPR/Pemerintah
11.	RUU tentang Pertahanan	DPR
12.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR/Pemerintah
13.	RUU tentang Tugas Perbantuan Militer	DPR
14.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	Pemerintah
15.	RUU tentang Rahasia Negara	Pemerintah
16.	RUU tentang Persandian	Pemerintah
17.	RUU tentang Ketahanan Nasional	Pemerintah
18.	RUU Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR
19.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Telekomunikasi	Pemerintah
20.	RUU tentang Paradiplomasi	DPR
21.	RUU tentang Pertanahan	DPR
22.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/Pemerintah
23.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR

**Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap
Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019**



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

24.	RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)	DPR/Pemerintah/DPD
25.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR
26.	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional (RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)	
27.	RUU tentang Ibukota Negara	DPR/Pemerintah
28.	RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	DPR/Pemerintah/DPD
29.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Pemerintah
30.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	DPR/DPD
31.	RUU tentang Provinsi Bali	DPR/DPD
32.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia	DPR/Pemerintah
33.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD
34.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD
35.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR/Pemerintah
36.	RUU tentang Susunan dan Kedudukan tentang MPR, DPR, dan DPD	DPR
37.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR
38.	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR
39.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR
40.	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
41.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	DPR
42.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR
43.	RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri	DPR
44.	RUU tentang Perkotaan	Pemerintah
45.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	Pemerintah

Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019



46.	RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah	DPD
47.	RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah	DPD
48.	RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	DPD
49.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD
50.	RUU Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	DPD
51.	RUU tentang Perubahan UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD
52.	RUU tentang Ketransmigrasian	DPD
53.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	DPR
54.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR
55.	RUU tentang Badan Usaha Milik Desa	DPD
56.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPD
57.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	DPR/Pemerintah
58.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	DPR/Pemerintah
59.	RUU tentang Penyadapan	DPR
60.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
61.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR/Pemerintah/DPD
62.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
63.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR/Pemerintah
64.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	DPR
65.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR/Pemerintah
66.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	DPR/Pemerintah
67.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung	DPR
68.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pemerintah
69.	RUU tentang Perkumpulan	DPR
70.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR
71.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
72.	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
73.	RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi	PEMERINTAH

Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

74.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH
75.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	PEMERINTAH
76.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	PEMERINTAH
77.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH
78.	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal	PEMERINTAH
79.	RUU tentang Ekstradisi	PEMERINTAH
80.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2006 tentang Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
81.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar Negara	PEMERINTAH
82.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH
83.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum	DPR
84.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
85.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR
86.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR
87.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	DPR
88.	RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	DPR
89.	RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan	DPR
90.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	DPR
91.	RUU tentang Peradilan	DPR
92.	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
93.	RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan	DPD
94.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan	DPR
95.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme	DPR
96.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR
97.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/Pemerintah/DPD
98.	RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan	DPR

**Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap
Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019**



99.	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan/RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR
100.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	DPR
101.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya/RUU tentang Perlindungan Keberagaman Kekayaan Hayati/RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati DPR/DPD	DPR/DPD
102.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/Pemerintah/DPD
103.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/Pemerintah
104.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/Pemerintah
105.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan/RUU tentang Ketahanan Pangan/RUU tentang Kedaulatan Pangan	DPR/Pemerintah/DPD
106.	RUU Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani	DPR/Pemerintah
107.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/Pemerintah
108.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	DPR/Pemerintah
109.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DPD
110.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	DPD
111.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH
112.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/Pemerintah
113.	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPD
114.	RUU tentang Pertembakauan	DPR

**Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap
Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019**



115.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR
116.	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR
117.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan	DPR
118.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR
119.	RUU tentang Transportasi Daring	DPR
120.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPR
121.	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
122.	RUU tentang Sanitasi	DPR
123.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal/RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan	DPR
124.	RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	DPR
125.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD
126.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR
127.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD
128.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/Pemerintah/DPD
129.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR/DPD
130.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/DPD
131.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH
132.	RUU tentang Metrologi	PEMERINTAH
133.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	DPR
134.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/DPD
135.	RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya	DPR
136.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
137.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR
138.	RUU tentang Geologi	DPR/DPD

Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019



139.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagalistrikan/RUU tentang Listrik dan Sinyal	DPR/DPD
140.	RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup	DPR
141.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	DPR/Pemerintah
142.	RUU tentang Kendaraan Listrik	DPR
143.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD
144.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/DPD
145.	RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR
146.	RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial	DPR
147.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD
148.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	DPR
149.	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR
150.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR
151.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR
152.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR
153.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional	DPR
154.	RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender	PEMERINTAH
155.	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD
156.	RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR
157.	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR
158.	RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara	DPR
159.	RUU tentang Minuman Beralkohol	DPR
160.	RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual	DPR
161.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR
162.	RUU tentang Pengasuhan Anak	DPR
163.	RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial	DPR
164.	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR
165.	RUU tentang Kesejahteraan Sosial	DPD

**Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap
Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019**



166.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR
167.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR
168.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
169.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR
170.	RUU tentang Kefarmasian	DPR
171.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/Pemerintah
172.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	DPR
173.	RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)	PEMERINTAH
174.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR/DPD
175.	RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)	DPR
176.	RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	DPR
177.	RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan	DPR
178.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	DPR
179.	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	DPR
180.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR
181.	RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan	DPR
182.	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR
183.	RUU tentang Profesi Psikologi	DPR
184.	RUU tentang Perlindungan Hak Pasien	DPR/DPD
185.	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH
186.	RUU tentang Praktik Kedokteran	PEMERINTAH
187.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	PEMERINTAH/DPD
188.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/RUU tentang Pendidikan	DPR/Pemerintah
189.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (RUU tentang Kepariwisata dan Industri Pariwisata/RUU tentang Kawasan Wisata Khusus/RUU tentang Destinasi Wisata Halal)	DPR
190.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR

Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019



191.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR
192.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan	DPR
193.	RUU tentang Fasilitasi Sarana Prasarana Pendidikan	DPR
194.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR
195.	RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam	DPR
196.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD
197.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR
198.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	DPR
199.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman/RUU tentang Sistem Perfilman	DPR
200.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR
201.	RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional	DPR
202.	RUU tentang Persepakbolaan	DPR
203.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD
204.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai	DPR/Pemerintah
205.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/Pemerintah
206.	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)	PEMERINTAH
207.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR
208.	RUU tentang Cukai (RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai)	DPR/Pemerintah
209.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH
210.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR/Pemerintah
211.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR
212.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR/Pemerintah
213.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR
214.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/Pemerintah

Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019



215.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/Pemerintah
216.	RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional	DPR
217.	RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR
218.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
219.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/Pemerintah
220.	RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)/RUU tentang Keuangan Digital	DPR
221.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	DPR/Pemerintah
222.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR
223.	RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan	DPR
224.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
225.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	DPR
226.	RUU tentang Ekonomi Syariah	DPR
227.	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR
228.	RUU tentang Kepailitan	PEMERINTAH
229.	RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)	PEMERINTAH
230.	RUU tentang Pelaporan Keuangan	PEMERINTAH
231.	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH
232.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH
233.	RUU tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH
234.	RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa	PEMERINTAH
235.	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH
236.	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH
237.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH
238.	RUU tentang Perlelangan	PEMERINTAH
239.	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	PEMERINTAH
240.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH
241.	RUU tentang Kepabeanaan	PEMERINTAH
242.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	DPD
243.	RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD
244.	RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah	DPD
245.	RUU tentang Pinjaman Daerah	DPD

Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

246.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD
247.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD
248.	RUU tentang Perubahan UU 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
	a. RUU tentang Perkoperasian
	b. RUU tentang Perubahan Ketiga tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
	c. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

**Informasi dalam dokumen ini berdasarkan hasil pemantauan PSHK terhadap
Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 17 Desember 2019**